ADVOKASI SOSIAL LEMBAGA “APIK MANDIRI” DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh:

AJI KRIDA PRATAMA

1716021052

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

ADVOKASI SOSIAL LEMBAGA "APIK MANDIRI" DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AJI KRIDA PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ADVOKASI SOSIAL LEMBAGA "APIK MANDIRI" DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

AJI KRIDA PRATAMA

Penanganan anak jalanan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih kurang optimal. Oleh karena itu, advokasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan oleh pihak non-pemerintah sangat dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan strategi atau pendekatan mikro, yaitu peran utama Lembaga Apik Mandiri yang merupakan pekerja sosial sebagai broker sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber bantuan yang tersedia di lingkungan sekitar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kegiatan *assessment* Lembaga Apik Mandiri sudah sesuai dalam menggali pemenuhan hak-hak anak tetapi kurang menggali lebih dalam mengenai program minat bakat anak jalanan. 2) Kegiatan memfasilitasi pilihan-pilihan dan sumber informasi dalam pemenuhan hak anak sudah terlaksana teapi belum berdampak akan kesejahteraan anak dan masih ada beberapa kekurangan mengenai 10 program minat bakat yang seharusnya bisa terlaksana semuanya tetapi hanya dua program yang terlaksana. 3) Kegiatan membangun kerjasama antar lembaga pelayanan sosial. 4) Relasi kerja sama dengan profesi kunci kegiatan berhasil dilaksanankan dan mendapat beberapa program tetapi masih minim sekali dalam membangun kerjasama baik dengan lembaga pelayanan sosial maupun relasi kunci. Berdasarkan hal tersebut advokasi sosial yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri belum sepenuhnya berhasil. Masih ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan secara baik terhadap peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan baik dari segi materil, spiritual, dan sosial serta pengembangan diri anak jalanan. Tetapi dari hasil kegiatan advokasi yang sudah terealisasikan sedikit demi sedikit lembaga Apik Mandiri dapat mengurangi kegiatan aktivitas anak jalanan untuk mencari uang di jalanan.

Kata kunci: Advokasi Sosial, Anak jalanan, Lembaga Apik Mandiri

ABSTRACT

SOCIAL ADVOCACY INSTITUTION "APIK MANDIRI" IN IMPROVING SOCIAL WELFARESTREET CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:

AJI KRIDA PRATAMA

The handling of street children by the Bandar Lampung City government, in this case, the Bandar Lampung City Social Service is still not optimal. Therefore, social advocacy to improve the social welfare of street children by non-government parties is urgently needed. This study uses a micro strategy or approach, namely the main role of the Apik Mandiri Institute which is a social worker as a social broker who connects clients with sources of assistance available in the surrounding environment. The method used is descriptive qualitative. Data analysis techniques, namely, data collection, data reduction, data presentation. Data collection techniques, namely, observation, documentation, interviews. The results of the study show that 1) The Apik Mandiri Institute's assessment activities are appropriate in exploring the fulfillment of children's rights but lack of digging deeper into the talent interest program of street children. 2) Activities to facilitate choices and sources of information in the fulfillment of children's rights have been carried out but have not had an impact on children's welfare and there are still some shortcomings regarding the 10 talent interest programs that should have been implemented, but only two programs were implemented. 3) Activities to build cooperation between social service institutions. 4) Cooperation relations with key professions have been successfully implemented and have received several programs, but there is still very little cooperation in building good cooperation with social service institutions and key relationships. Based on this, the social advocacy carried out by the Apik Mandiri Institute has not been fully successful. There are still some activities that have not been realized properly towards improving the social welfare of street children both in terms of material, spiritual, and social aspects as well as the self-development of street children. But from the results of advocacy activities that have been realized little by little the Apik Mandiri institution can reduce the activities of street children to make money on the streets.

Keywords: Social Advocacy, Street Children, Apik Mandiri Institute

Judul Skripsi	: Advokasi Sosial Lembaga Apik Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung
Nama Mahasiswa	: Aji Krida Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716021052
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Tabah Maryana, S.I.P, M.Si.
NIP: 197106042003122001

2. Komisi Pembimbing

Kris Ari Suyandari, S.IP, M.IP
NIK. .231610900918201

3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 19611218198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryana, S.I.P, M.Si.** .....

Sekretaris : **Kris Ari Suyandari, S.IP, M.IP** .....

Penguji : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
19610807 198703 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

Aji Krida Pratama
NPM. 1716021052

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aji Krida Pratama, anak pertama dari 4 (empat) bersaudara. Dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 25 Februari 1999 dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Waginah. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat sekolah dasar yaitu SD Negeri 3 Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat sekolah menengah pertama penulis selesaikan di SMP Negeri 1 Jati Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan sekolah menengah atas penulis selesaikan di SMAS Al- Azhar 3 Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Penulis sangat bersyukur pada tahun 2017 diterima dan tercatat sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui Jalur pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat (SBMPTN). Selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, penulis mengikuti kegiatan demi menunjang kapasitas dan kualitas diri. Penulis aktif di DPM U KBM Universitas Lampung sebagai staff ahli di Komisi II dalam bidang Perundang-Undangan dan Advokasi pada tahun 2018-2019. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2020 di Desa Fajar Asri, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji sebagai Koordinator Desa (Kordes). Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fisip Unila tahun 2020 di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung. Demikian sekelumit aktivitas penulis di masa kuliah sejak rentang waktu 2017-2022

MOTTO

Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memberdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memberdayakan kamu tentang Allah

(Q.S Fatir ayat 5)

Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah

(Ibnu Atha' illah As-Sakandari)

Bahagia itu sangat sederhana, kita hanya perlu mensyukuri dengan nikmat yang telah Allah berikan

(Aji Krida Pratama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumil Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Bapak tercinta

Suparman dan Waginah

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Advokasi Sosial Lembaga Apik Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung". Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Ibu Lilih Muflihah, S.IP. M.IP. selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti.
5. Ibu Dr. Tabah Maryana, M.Si selaku pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan kritik, saran, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Kris Ari Sunyandari, S.IP. M.IP. selaku pembimbing kedua penulis. Terimakasih atas segala bimbingannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi.

7. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP. selaku dosen penguji, terimakasih telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat luar biasa dan sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak/ibu semua. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalamannya. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi penulis untuk merengguh ilmu pengetahuan.
9. Ketua Lembaga Apik Mandiri dan anak jalanan beserta orang tua anak jalanan yang berada pada binaan Lembaga Apik Mandiri, serta seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis.
10. Terimakasih untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Suparman dan Ibu Waginah yang selalu mendoakan anaknya (penulis) dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih telah berjuang untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Bapak dan Ibu tercinta.
11. Keluarga besar dari Bapak Suparman, paman, bibi, sepupu dan ponakan. Terimakasih sudah memberikan do’a, motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
12. Keluarga besar dari Bani Potro Rejo ayah dari ibu tercinta saya Ibu Waginah, Mbokde, Pakde, Kakang, Mbak, Sepupu dan Ponakan. Terimakasih sudah memberikan do’a, motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa kepada penulis untuk menyesaikan proses perkuliahan dengan lancar.
14. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B dan Paralel yang telah memberikan momen indah selama masa perkuliahan.
15. Sahabat penulis Septian Adi Putra, S.IP, M. Rizki Utama S.IP, Teddy Febrian Hasan, S.IP Riandiaka, Amri Maulana, Agung Dwita Lestari, Devina Aprilia, Deni Riadi, Iksan Muhammad, Ihsan Adi serta teman seperjuangan satu

angakatan Ilmu Pemerntahan 2017 yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas doa, motivasinya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kedepannya.

16. Terimakasih untuk semua yang menyayangi dan mendoakan penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR BAGAN ..... **xvii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xviii**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Simpulan 11

II. TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1 Pemberdayaan Kelompok Marginal 12
2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat 12
2.1.1 Kelompok Marginal 16
2.2 Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan 20
2.3 Advokasi Sosial Untuk Kelompok Marginal 22
2.4 Simpulan 32

III. METODE PENELITIAN **33**
3.1 Jenis Penelitian 33
3.2 FokusPenelitian 34
3.3 Jenis Dan Sumber Data 35
3.4 Informan Penelitian 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 37
3.6 Teknik Analisis Data 40
3.7 Teknik Keabsahan Data 42
3.8 Simpulan 43

IV. GAMBARAN UMUM **44**
4.1 Lembaga Apik Mandiri 44
4.1.1 Profil dan Sejarah 44
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Apik Mandiri 46
4.1.3 Lokasi Lembaga Apik Mandiri 48

4.1.4 Struktur Organisasi Lembaga Apik Mandiri 48
4.2 Simpulan 53

V. Empat Langkah Advokasi Sosial Lembaga Apik Mandiri..... 54
5.1 Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan (*Assessment*)..... 55
1. Penjangkuan Anak Jalanan..... 55
2. Menyusun Prioritas Dari Kebutuhan dan Permasalahan Anak Jalanan 62
5.2 Memfasilitasi Pilihan-Pilihan, Memberikan Informasi dan Sumber Alternatif 65
5.2.1 Program EXCEED (*Eliminate Exploitative Child Labour Through Education and Economic Development*) 66
5.1.2 Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 74
5.3 Membangun Kontak Antar Lembaga Pelayanan Sosial 82
5.4 Menjalin Relasi Kerja Sama Dengan Berbagai Profesi Kunci 86
5.5 Simpulan 88

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 89
6.1 Kesimpulan 89
6.2 Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jumlah Anak Jalanan di Indonesia.....3
2. Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung 5
3. Strategi Advokasi...…….....27
4. Daftar Informan Penelitaian.....37
5. Waktu Pelaksanaan Wawancara.....39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kegiatan *asessment* Lembaga Apik Mandiri dengan AnakJalanan.....56
2. Hasil *Asessment* Pelayanan Lembaga Apik Mandiri.....61
3. Hasil Pengajuan Kegiatan Kebutuhan Dasar.....62
4. Alur pelayanan Lembaga Apik Mandiri.....66
5. Kegiatan Pelatihan Perhotelan dengan Krida Wisata Perhotelan.....68
6. Pembuatan Souvenir oleh Anak Jalanan.....71
7. Hasil Pembuatan Souvenir oleh Anak Jalanan..... 72
8. Sosialisai Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga..... 75
9. Kegiatan Rekreasi Dan Outbond Anak Jalanan.....79
10. Nota kerjasama antara Kementrian Soial dan Lembaga Apik Mandir.....83
11. Sertifikat Pelatihan Kerja Kridawista.....87

DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Kerangka Pikir…….....31
2. Struktur Oraganisasi Lembaga Apik Mandiri.....49

DAFTAR SINGKATAN

LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Kemensoso RI	: Kementrian Sosial Republik Indonesia
PHK	: Pemutusan Hukuman Kerja
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
PMKS	: Penyandang Masalah Kesjahteraan Sosial
LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
TEPAK	: Temu Penguatan Kapasitas Anak Keluarga
PKK	: Penguatn Kapasitas Keluarga
Perda	: Peraturan Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PKA	: Peningkatan Kesejahteraan Anak
PKSA	: Program Kesejahteraan Sosial Anak
EXCEED	: *Child Labour Through Education and Economic Development*
USDOL	: *US Department Of Labor*
INGO	: *International Non Governmental Organization*
Sakti Peksos	: Satuan Bakti Pekerja Sosial
UMP	: Upah Minimum Provinsi
BRSAK	: Balai Rehabilitasi Sosial Anak Khusus

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini merupakan penelitian mengenai advokasi sosial yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri, yang dalam hal ini adalah sebagai organisasi masyarakat yang menangani permasalahan sosial salah satunya mengenai kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Berbeda dengan studi-studi lain mengenai advokasi sosial yang dilakukan tidak serta merta berhubungan dengan lembaga hukum, melainkan advokasi sosial yang dilakukan pekerja sosial sebagai penghubung antara anak jalanan sebagai penerima manfaat dengan sumber-sumber bantuan yang ada di masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui advokasi sosial yang dilakukan oleh Apik Mandiri dalam meningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan krusial yang menyertai proses pembangunan. Anak jalanan yang identik dengan budaya kemiskinan dan dianggap sebagai penyimpangan dari fungsi sosial anak karena berbagai aktivitas yang mereka lakukan di jalanan, hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan sebuah keterpaksaan yang harus diterima karena sebab tertentu (Sugiharto, 2009:15).

Masalah anak jalanan ternyata tidak sekedar persoalan kemiskinan, dalam beberapa kasus, ketidakharmonisan keluarga (*broken home*), masalah yang menyangkut hubungan anak dengan orang tua, dan kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi pemicu anak- anak untuk mengambil inisiatif hidup mandiri di jalanan (Suyanto, 2013: 211). Selain itu, menurut Andari dalam Rivanlee Anandar dan Hery Wibowo (2015:143) mengatakan penyebab anak

turun ke jalan antara lain stress yang dialami orang tua, rendahnya kemampuan dalam pengasuhan dan perawatan anak, kekerasan dalam keluarga, rendahnya tingkat kemampuan ekonomi keluarga mengakibatkan pola asuh dan kebutuhan anak tidak terpenuhi.

Ketidakmampuan orang tua tersebut, membuat mereka harus mampu mempertahankan hidupnya dari menjual jasa, menjajakan beberapa makanan dan minuman, meminta belas kasihan orang lain atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Tidak mengherankan jika sejumlah anak jalanan tanpa rasa malu meminta-minta belas kasihan, mengompas memalak pengendara kendaraan bermotor di perempatan lampu merah perkotaan bahkan mereka tidak luput dari tindak kekerasan yang dilakukan sebagian orang yang kuat yang ada di jalanan.

Terkait hal terebut anak jalanan memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari pelecehan, kekerasan dan diskriminasi. Dalam realitanya anak jalaanan banyak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakakukan masyarakat, yang menganggap bahwa anak jalanan merupakan limbah dan perusak tata kota karena perilakunya yang bebas dan tidak berbudaya (Suyanto, 2013: 186).

Perilaku sosial anak jalanan tidak selalu menyimpang seperti pandangan masyarakat selama ini, karena anak jalanan masih memegang nilai dan norma dalam masyarakat, serta solidaritas terhadap sesama anak jalanan (Puruhita, Suyahmo dan Hamdan, 2016: 104). Anak jalanan memang benar selalu dikaitkan dengan kekerasan yang mereka lakukan di jalanan, tetapi kenyataannya karena tekanan dan tuntutan dari orang yang lebih kuat dari mereka, maka anak jalanan mampu melakukan hal tersebut.

Dalam persoalan tersebut, anak di Indonesia menjadi masalah yang belom pernah terselesaikan dari tahun ke tahun sampai sekarang. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial tercatat hingga tahun 2019 sebanyak 183.104 anak dengan rincian 6.572 Anak

membutuhkan perlindungan khusus, 8.507 anak jalanan, 8.507 balita, 92.861 anak memerlukan pengembangan fungsi Sosial dan 64.053 anak telantar. Berdasarkan keberadaannya, dari 183.104 anak tersebut terdiri dari 106.406 anak di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dan 76.698 anak di dalam keluarga.

Jumlah anak jalanan di Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2009 sebanyak 230.000 anak,tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, pada 2011 turun menjadi 67.607 anak,tahun 2014 mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahun 2010 menjadi 420.000 anak jalanan (Kemensos RI). Tahun 2015 menjadi 33.400 anak, serta 2017 jumlah anak jalanan yang ada sebanyak 16.290 anak yang tersebar di 21 provinsi, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan di Indonesia

Tahun	2006	2009	2010	2011	2014	2015	2017	2019
Jumlah	232.894	230.000	159.230	67.607	420.000	33.400	16.290	8.507

Sumber: Kemensos RI, 2019

Menurut data tersebut, masih banyak jumlah anak jalanan di Indonesia, mengalami penurunan yang signifikat sebanyak tiga kalilipat dari tahun 2006 sampai tahun 2019 ini, apalagi pada tahun 2020 dunia bahkan Indonesia mengalami pandemik covid 19 yang membuat Indonesia mengalami penurunan pendapatan pada sektor perekonomian. Sehingga banyak anak-anak yang mengalami dampak buruk seperti mendapatkan tekanan untuk bekerja yang lebih berat dari beban tubuh mereka, peran orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, karena perihal PHK atau diberhentikan dari tempat pekerjaan serta kondisi ekonomi seperti ini yang menganjurkan anak tersebut untuk bekerja di jalanan guna mengurangi beban orang tua nya.

Berdasarkan kondisi ekonomi yang serba kekurangan terpaksa banyak anak-anak yang memilih melakukan pekerjaan di jalanan karena mereka hanya bisa

pada sistem pekerjaan yang *simple,* yang tidak begitu banyak menggunakan peralatan atau modal yang besar seperti membersihkan kaca mobil atau motor, mengamen, memulung, dll. Serta belum mempunyai kemampuan yang mempuni untuk melakukan pekerjaan yang lebih layak. Hasil survey oleh Komisi Perlindungan anak Indonesia pada masa pandemik covid 19 di tahun 2020 terkait situasi pekerjaan anak bahwasannya survei tersebut ditemukan pekerja anak yang bekerja di daerah perkotaan, sebanyak 14 lokus (85%) yang diobservasi pada sektor jenis pekerjaan anak ada 5 yakni anak jalanan sebanyak 15,8%, anak yang dipekerjakan sebagai pekerja sex komersial sebanyak 31,6%, anak pemulung sebanyak 15,8%, anak yang dipekerjakan di pertanian sebanyak 21,1% dan pekerja rumah tangga anak sebanyak 15,8%.

Persoalan anak jalanan juga menjadi beban bagi pemerintahan Provinsi Lampung khususnya wilayah yang rawan sekali dengan aktivitas pekerja jalanan wilayah seperti pasar, perempatan lampu merah, stasiun, terminal dan lain-lain, yang berada pada wilayah perkotaan di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus di Kota Bandar Lampung yang wilayahnya sangat diminati oleh para pekerja jalanan dengan keramaian disetiap jalan, pasar, terminal, sehingga membuat para pekerja dijalanan sangat senang dan bisa memperoleh banyak keuntungan.

Anak jalanan di Kota Bandar lampung merupakan persoalan yang harus di selesaikan oleh pemerintah baik bekerja sama dengan dinas sosial serta lembaga swadaya masyarakat. Mereka seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini, tetapi akibat tekanan kemiskinan maka secara sukarela maupun terpaksa anak jalanan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi keluarga miskin. Adanya kenyataan sosial dan *problem* sosial dalam masyarakat masih banyak anak-anak yang belum menikmati hak asasi secara wajar baik yang menyangkut perawatan, pembinaan jasmani dan rohani, pendidikan dan lain-lain sehingga kesejahteraan anak kurang terjamin.

Demikian data dari tahun dari 2017-2021, dengan rincian anak-anak jalanan di kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung
1	2017	189
2	2018	197
3	2019	184
4	2020	210
5	2021	230

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

Menurut data di atas dari tahun 2017-2021 anak jalanan mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu jauh, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak anak-anak jalanan yang terlantar berkeliaran dan tersebar hampir setiap perempatan dan pertigaan lampu merah jalan protokol kota Bandar Lampung. Jumlah anjal didominasi anak-anak perempuan, banyak yang berada di pasar-pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung.

Banyaknya resiko yang nantinya dapat mengancam serta yang membayang-bayangi anak-anak yang hidup di jalan maka negara, keluarga, dan lembaga sosial masyarakat harus hadir untuk melindungi dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan tersebut. Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 di jelaskan bahwa Perlindungan Anak di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi:

> "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Berdasarkan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara, keluarga, dan Lembaga Sosial Masyarakat mampu memegang tanggung jawab bersama, supaya anak-anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan, salah satunya anak jalanan seharusnya negara, keluarga, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu ikut hadir dan membantu untuk mengembalikan kembali hak-hak yang seharusnya didapatkan, karena kesejahteraan anak jalanan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh anak itu sendiri (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atau Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak).

Peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi banyaknya aktivitas di jalanan memasukkan anak jalanan sebagai salah satu kategori dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Pada tahun 2010 pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Keberadaan anak jalanan yang menggunakan jalan raya yang tidak sesuai dengan fungsi jalan karena dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pada lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksananakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Pemerintahan Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah seringkali melakukan razia dan pembinaan melalui sosialisasi terkaait anak jalanan. Namun, ketika anak jalanan dipulangkan mereka kembali lagi ke kota untuk melalakukan hal yang sama. Persoalan tesebut sesuai pra riset yang dilakukan peneliti di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, bahwa saat ini Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum memiliki fasilitas yang

menunjang untuk melakukan pembinaan untuk anak-anak jalan dan anak-anak yang terlantar karena tidak memiliki gedung yang memadai.

Anak jalanan merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Anak jalanan sendiri termasuk ke dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dimana untuk melakukan penanganannya perlu dilakukan upaya koordinasi secara terpadu dengan mengikut sertakan seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah maupu non pemerintah, juga peran serta masyarakat luas dalam pelaksanaan kebijakan teersebut.

Melihat keadaan yang terjadi di Kota Bandar Lampung terkait anak jalanan Lembaga Apik Mandiri ingin ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Lembaga Apik Mandiri sendiri merupakan Lembaga kesejahteraan sosial yang hadir ketika tidak adanya ketidakpuasan dihati masyaarakat sipil melihat keadaan yang terjadi disekitarnya. Sehingga membuat mereka simpati dan ingin membantu kaum yang lemah dan yang membutuhkan. Lembaga Apik Mandiri dalam menangani permasalahan anak, baik anak jalanan, anak terlantar, anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak *marginal*. Kondisi dan fenomena tersebut yang perlu dibantu, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, dan membantu tumbuh kembang anak yang lebih jauh sehingga tidak akan mengganggu ataupun menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Advokasi sosial Lembaga Apik Mandiri terhadap anak jalanan, yaitu menggunakaan konsep pemberdayaan dan pelayanan yang diberikan untuk memastikan anak-anak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan pemenuhan hak-hak anak serta pemberdayaan bagi keluarga. Pelayanan dan pemberdayaan yang diberikan oleh Lembaga Apik Mandiri kepada anak jalanan berupa pelatihan dan keterampilan dalam pembuaatan souvenir dan

atau makanan, sosialisasi terhadap oraang tua anak jalanan terkait hak-hak anak, dan membantu dalam mendapatkan hak-hak anak jalanan terkait bantuan pendidikan serta bantuan sosial lainnya. Sehingga kegiatan dan bantuan terebut dapat mengurangi kegiatan mereka dijalanan dan membantu hidup mereka menjadi lebih baik.

Melihat keadaan tersebut, menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Lembaga Apik Mandiri, advokasi sosial yang dilakukan dengan diakhirinya mencarikan atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mampu memperkerjakan anak jalanan yang sudah dibina dan diberdayakan. Bagi anak jalanan yang tidak berkeinginan untuk bekerja yang sudah ditentukan atau dengan kata lain mereka ingin memiliki usaha sendiri sesuai kemampuan yang telah mereka pelajari. Lembaga Apik Mandiri berusaha memberikan solusi dalam mencarikan bantuan sosial untuk menunjang usaha, dalam pemanfaatan bantuan sosial tersebut pihak Lembaga Apik Mandiri selalu melakukan pengawasan dari pencairan dana bantuan sosial hingga rincian penggunaannya. Sehingga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan dapat terhindar dari penyalah guanaan bantuan soaial.

Penelitian terdahulu ini tidak lepas dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan serta sebagai bahan pertanda dan kajian dalam menulis penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu ini sebagai perbandingan dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik tentang model advokasi sosial pada anak jalanan, antara lain:

Pertama, Wahyu Nurharyati (2017) dengan judul “Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung” Di dalam jurnal tersebut mereview terhadap model awal program pemberdayaan perempuan keluarga miskin menunjukkan bahwa belum maksimalnya dukungan dan perhatian dari pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang telah dilakukan di RW07 Desa Cimenyan, sehingga diperlukan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga

miskin berupa perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan program agar mendapatkan dukungan berupa legalitas formal dari pemerintah desa.

Kedua, Rintan Mirza Diani (2018) dengan judul "Strategi Advokasi Bagi Anak Jalanan Melalui Yayasan Rumah Impian". Skripsi tersebut dapat di simpulkan hasil dari penelitiannya adalah menyatakan bahwa, Tingginya jumlah anak jalanan dengan peningkatan yang terjadi setiap tahunnya menyebabkan permasalah tersebut tidak kunjung terselesaikan. Permasalahan tersebut merupakan dampak dari masih banyaknya keluarga miskin yang ada di Daerah Istimewah Yogyakarta, hal tersebut menyebabkan anak dari keluarga miskin tersebut bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berpegang pada prinsip *the street is not for kids*, Yayasan Rumah Impian melakukan advokasi dengan tujuan agar anak-anak jalanan tersebut mampu mengakses playanan-pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan juga administrasi.

Ketiga, Pipit Choirul Puspitasari (2019) dengan judul "Advokasi Sosial Anak Jalanan Di Kota Malang (Studi Pada Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan di Kota Malang, Jawa Timur)". Di dalam sekripsi tersebut dapat di simpulkan hasil dari penelitiannya adalah bagaimana fenomena anak jalanan yang tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, perlakuan yang tidak adil yang seharusnya tidak di dapatkan oleh anak-anak jalanan.

Secara garis besar, dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu memiliki kesamaan, yakni sama-sama meneliti tentang subjek anak jalanan. Dengan perbedaan yang terletak pada lokasi dan tempat penelitian masing-masing.

Penelitian ini juga dibedakan terhadap fokus apa yang akan peneliti teliti yakni berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung oleh Advokasi Sosial yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri. Sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda-beda antara lain ada yang berfokus terhadap landasan yuridis yaitu pemenuhan hak-hak yang seharusnya atau landasan hukumnya, ada yang berfokus terhadap

pemberdayaannya dan juga yang berfokus terhadap pembinaan secara moral terhadap anak jalanan namun pada dasarnya tetap satu rumpun yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas maka masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana advokasi sosial Lembaga Apik Mandiri dalam meningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung untuk?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di sini adalah Untuk mengetahui advokasi sosial yang dilakukan oleh Apik Mandiri dalam meningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Manfaat Akademik

   Penelitian ini bermanfaat menyediakan teknik pemberdayaan masyarakat marginal, terutama anak jalanan, melalui empat langkah advokasi sosial sehingga dapat membantu menambah informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, advokasi, dan pemberdayaan serta menambahkan sumber pengetahuan bagi kompentensi pekerja sosial yang khususnya bekerja di bidang advokasi sosial dan pengembangan anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian Berdasarkan empat langkah advokasi sosial yang di gunakan belum menunjukkaan perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan. Seharusnya advokasi dilakukan untuk membantu anak jalanan mendapatkan keadaan baik dan sehat atau sejahtera dan kepentingan sebagian besar anak jalanan termasuk kebutuhan fisik, mental. perasaan, spiritual, dan ekonomi dapat terpenuhi. Karena hal tersebut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan advokasi sosial terhadap anak jalanan. Sehingga pelaksanaan advokasi sosial tersebut dapat membawa *feedback* yang positif bagi anak jalanan terhadap peningkatan kesejahteraan sosialnya.

b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap advokasi sosial dalam pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Lembaga Apik Mandiri, supaya menjadi acuan dalam pembuatan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Sehingga Lembaga Apik Mandiri dapat memperbaiki kegiatan dan program yang belum terealisasikan dengan baik terhadap peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

1.5 Simpulan

Penjelasan pada bab ini memuat latar belakang permasalahan kurangnya tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sesuai UU No.10 Tahun 2010 tentang menanggulangi permasalahan sosial salah satunya anak jalanan. Tetapi Dinas sosial Kota Bandar Lampung hanya melakukan penangkapan dan pendataan tanpa melakukan pembinaan atau pemberdayaan setelah itu, mereka dikembalikan keorang tua masing-masing. Karena hal

tersebut membuat mereka tidak mempunyai rasa jera selalu kembali lagi ke jalanan untuk mengurangi beban kedua orang tua mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut kurangnya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan sosial anak jalanan membuat seluruh elemen masyarakat harus ikut andil dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung. Lembaga Apik Mandiri merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang menangani permasalahan sosial yang ada di Kota Bandar Lampung salah satunya anak jalanan. Advokasi sosial yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri sebagai pialang atau perantara Antara sumber-sumber bantuan yang ada dimasyarakat dengan anak jalanan.

Bab selanjutnya berisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pengertian pemberdayaan masyarakat, kelompok *marginal*, kesejahteraan sosial kelompok *marginal*, advokasi sosial untuk kelompok *marginal*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab I telah dipaparkan mengenai permasalahan anak jalanan di Kota Bandar lampung serat advokasi sosial Lembaga Apik Mandiri dalam melakukan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Bab II ini memaparkan konsep pemberdayaan masyarakat, kelompok *marginal*, kesejahteraan sosial kelompok *marginal*, advokasi sosial untuk kelompok *marginal*.

2.1 Pemberdayaan Kelompok Marginal

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh sebab itu ide utama pemberdayaan yang selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan selalu dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Dedeh Maryani ,Ruth Roselin E. Nainggolan dalam bukunya pemberdayaan masyarakat (2019:7), mengartikan pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarkat itu sendiri ikut berpartisipasi didalamnya.

Selanjutnya dikemukakan oleh Adi (2008: 80) dan Ife (2008 : 411-482), bahwa terdapat berbagai bidang pemberdayaan yang berelasi dengan kesejahteraan sosial, yaitu bidang ekonomi, lingkungan, sosial budaya, politik, kesehatan, hukum, dan spiritual. Bidang-bidang pemberdayaan tersebut memberikan penegasan, bahwa pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu memerlukan sinergi yang kuat antar bidang tersebut. Tanpa ada sinergi antar bidang, maka tujuan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.

Dengan kata lain dalam proses pemberdayaaan yang menentukan keberhasilan dari program ataau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdaayaan tetapi juga oleh aktifnya orang yang diberdaayaan untuk mengubah kondisi atau situasi yang lebih baik.

Menurut Dedeh Maryani , Ruth Roselin E. Nainggolan dalam bukunya pemberdayaan masyarakat (2019:11-12), untuk mencapai program pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut :

1) Prinsip Kesetaraaan

   Kedudukan antara masyakat yang sedang diberdayakan dengan lembaga yang memberikan program harus sejajar atau setara, dengan demikian mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian akan lebih efektif. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

2) Prinsip Partisipasi

   Pemberdayaan masyarakat perlu adaya pendamping yang berkoitmen tinggi dalam proses tersebut sehingga menimbulkan sifat yang antusias yang tinggi dari pihak yang diberdayakan, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu.

3) Prinsip Keswadayaan atau kemandirian

Dalam program pemberdayaan pihak yang diberdayakan harus memiliki kemampuang untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya dan kemauan serta mereka mampu memecahkan permasalahan mereka sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka sendirin dan keluarganya.

4) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang supaya bisa berkelanjutan, pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengola kegiatatannya sendiri.

Adapun dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat perlukan diperhatikan beberapa pendekatan dan strategi. Menurut Mahmudi dalam Suradi (2011: 9), beberapa pendekatan dan strategi dalam proses pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

1. Memulai Dengan Tindakan Mikro.

Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policy input* dan *policy reform* sebagai unsur utama pemberdayaan, sehingga memiliki dampak yang lebih luas.

2. Membangun Kembali Kelembagaan Rakyat.

Peran serta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat secara teknis membutuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri.

3. Pengembangan Kesadaran Rakyat.

Pengembangan kesadaran rakyat Diperlukan adalah tindakan politik yang berasis pada kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Pendidikan altematif dan kritis merupakan pendekatan yang sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran rakyat.

4. Redistribusi Sumber Daya Ekonomi

Merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi nasional serta pendayagunaannya dengan segala resiko dan keuntungan yang akan dihadapi.

5. Kontrol Kebijakan dan Advokasi.

Upaya menciptakan sistem ekonomi modem dan meninggalkan sistem ekonomi primitif (*primitive capitalisme*) haruslah didukung oleh berbagai kebijakan politik yang memadai oleh pemerintah. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya pemberdayaan rakyat maka kekuasaan pemerintahan harus dikontrol. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan upaya pemberdayaan rakyat haruslah diadvokasi. Untuk ini sangatlah penting munculnya kelompok penekan yang melakukan peran kontrol terhadap kebijakan.

6. Pengembangan Sektor Ekonomi Strategis

   Sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Ini merupakan upaya untuk menggeret gerbong ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Dimaksud produk strategis (unggulan) di sini tidak hanya produksi yang ada di masyarakat laku di pasaran.

7. Membangun Jaringan Ekonomi Strategis.

   Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan.

2.1.1 Kelompok Marginal

Marjinal berasal dari bahasa Inggris *marginal* yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya, marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan. Kaum marjinal atau masyarakat marjinal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat.

Variasi kondisi kaum marginal dapat dilihat dari aneka ragam dan bentuk status ekonomi, lokasi geografis tempat tinggal suatu kelompok masyarakat, ataupun dari kondisi sosial keluarga dan latar belakang pendidikan. Menurut Meri Sandora dalam konsep pendidikan anak marginal (2019: 199-200), kondisi anak marginal dikelompokkan dalam tiga aspek, meliputi: kondisi geografis, kondisi ekonomis, dan kondisi sosial.

1. Kondisi Geografis

   Geografis tempat tinggal (dominasi) yang menetap dengan medan daerah terpencil/sulit merupakan keadaan yang mengharuskan penduduk setempat menghadapi berbagai masalah dan kendala hidup dalam berbagai kebutuhan hidup dan informasi lainnya.

2. Kondisi Ekonomi

   Kondisi ekonomi yang dimaksudkan disini anatara lain dilihat dari tingakat pendapatan orang tua menurut UMP (Upah Minimum Provinsi), kondisi fisik tempat tinggal, serta kemampuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan anak. Bagi anak-anak yang berada dalam kelompok ini disebut marginal ekonomi yang biasanya sangat rentan terhadap putus sekolah atau sama sekali belum pernah sekolah

3. Kondisi Sosial

   Dalam kondisi sosial, biasanya anak-anak yang terbelenggu oleh lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan atau lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif akan mempengaruhi kecacatan hari esok yang cemerlang.

Salah satu contoh kaum *marginal*, adalah anak jalanan. Anak jalanan merupakan kata yang biasa di dengar masyarakat. Manakala menyebut anak jalanan, perhatian orang akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak jalanan, hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok, ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemukimannya di daerah-daerah kumuh atau bahkan

sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap, perangainya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan kekhasan lainnya.

Anak jalanan menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah. Ironisnya lagi, masyarakat bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia lazimnya. Sebab dalam anggapan mereka, anak jalanan adalah sampah yang tidak lagi mempunyai masa depan, tidak bisa diharapkan sebagai generasi penerus pembangunan dan tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat. Jadi, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan, masih berusia 5-18 tahun dan melakukan kegiatan di jalanan, pasar, terminal dan tempat-tempat umum lainnya.

Menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dalam Meria Sandoro (2019: 201), anak jalanan dibedakan menjadi 3 yaitu;

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Anak jalanan pada kelompok ini membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan.

2. C*hildren of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa anak masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Biasanya anak turun kejalanan disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang pada kategori ini sangat rawan terhadap perilaku menyimpang, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

3. *Children from families on the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya.

Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk mengambarkan kondisi dan kehidupa yang terjadi pada anak jalanan. Kondisi marginal menggambarkan mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun yang disebut dengan *eksploitatif* karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, tersuborganisasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman ataupun oknum aparat yang tidak bertanggung jawab (Suyanto, 2013: 200).

Karena hal tersebut pentingnya dilakukan advokasi sosial dalam pemberdaayaan terhadap anak jalanan yang merupakan salah satu bagian dari kelompok marginal, agar mereka mempunyai kemampuan untuk bisa mengubh hidup mereka menjadi lebih baik, dengan adanya advokasi sosial dalam pemberdayaan tersebut maka jam kerja mereka dijalanan dapat dikurangi, serta memberikan pembinaan, pengarahan, pemberdaayaan kepada anak jalanan maupun orang tua anak jalanan tersebut agar mereka tidak melepas anak mereka di jalanan.

2.2 Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tubuh dan berkembang menjadi penerus perjuangan dalam mencapai cita-cita bangsa. Sebagai penerus perjuangan maka anak perlu, dirawat, diibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemamuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Penting sekali bagi seorang anak mendapatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan suatu kondisi terjaminnya kehidupan manusia akibat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia hingga interaksinya dengan masyarakat sekitar. Pada dasarnya, kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera". Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansakerta "catera" yang berarti payung yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin. Sedangkan, sosial berasal dari kata "*socius*" yang berarti kawan, teman dan kerjasama.

Menurut Kep.Kementrian Sosial No.15A Tahun 2010 menjelaskan mengenai kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Serta penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11, 2009).

Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa kesejahteraan sosial mencakup pengertian yang luas, meliputi keadaan baik dan sehat atau sejahtera dan kepentingan sebagian besar manusia termasuk kebutuhan fisik, mental.

perasaan, spiritual, dan ekonomi dapat terpenuhi. Begitu pula kesejahteraan sosial meliputi lembaga-lembaga utama. kebijaksanaan program dan proses-proses yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan masalah-masalah sosial, perkembangan sumber-sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. Kesejahteraan sosial dapat pula dilihat sebagai tujuan yaitu keadilan sosial kemanusiaan dan pengawasan sosial.

Dalam kesejahteraan sosial ini tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting karena mencakup usaha-usaha untuk menbantu kensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak:

> Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (Bab 1 pasal 1).

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi, atau mengganti fungsi orangtua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau membentuk institusi baru (Johnson &Schwartz dalam Khaizu, 2009: 25)

Pelayanan sosial ini juga dibuat untuk membantu orang tua dalam mengurusi anak mereka di rumah memberikan tambahan pelayanan untuk anak, baik dirumah maupun pelayanan pengganti di luar rumah jika keadaan orangtua tidak memungkinkan. Dengan demikian jelaslah bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak diarahkan untuk mebantu memecahkan masalah anak yang berhubungan dengan ketergantungan anak, kemiskinan, ketelantaran anak, atau kenakalan anak, dan lain sebagainya. Pelayanan ini dapat diberikan dengan memberikan pertolongan tergadap orangtua dirumahnya sendiri,

maupun dalam institusi yang satu dengan yang lain saling bekerja sama, dimana pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat, memberdayakan, dan membangun keluarga dengan sumber-sumber yang ada.

2.3 Advokasi Sosial Untuk Kelompok Marginal

Melihat anak jalanan sebagai salah satu bagian dari Kaum *marginal* atau masyarakat marjinal sebagai masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan. Pemberdayaan sangat dibutuhkan guna mengubah anak jalanan tersebut menjadi lebih sejahtera. Menurut Edi Suharto (2009: 58) Pemberdayaan bermakna sebagai proses dan hasil maka pemahamannya tidak hanya meningkatkan kemampuan personal, keluarga, maupun masyarakat, melainkan juga perubahan terhadap sistem dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Maksudnya, pemberdayaan yang kita lakukan tidak hanya berkisar pada lingkaran peningkatan ekonomi saja, melainkan pula kemampuan dalam bidang sosial-politik (misalkan menyatakan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjangkau sumber-sumber kemasyarakatan, dan pelayanan sosial) sehingga bisa mengubah kehidupan sosial mereka dimasyarakat.

Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Dalam Bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan) (Topatimasang, et al, dalam Edi Suharto, 2005:2). Dalam konteks pemberdayaan orang miskin, advokasi tidak hanya berarti membela atau mendampingi orang miskin, melainkan pula bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.

Advokasi sosial sesungguhnya merupakan salah satu kegiatan dan atau strategi yang diperlukan di dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat

relevan dengan realitas kemiskinan yang ada, dimana sebagian besar penduduk miskin digolongkan ke dalam kemiskinan struktural. Disebabkan oleh struktur sosial masyarakat, maka orang secara individu maupun kelompok tidak mampu mengakses sumber daya yang ada.

Anak Jalanan yang termasuk dalam bagian kaum *Marginal* memerlukan pihak lain untuk keluar dari perangkap struktur masyarakat yang menghambat mereka. Pihak luar dimaksud, seperti lembaga kesejahteraan sosial, atau orang-orang yang terorganisasi di dalam sistem kesejahteraan sosial. Mereka ini yang akan melakukan usaha perubahan pada Anak Jalanan dengan cara menyalurkan mereka dengan sistem sumber yang tersedia. Sistem sumber tersebut terutama sistem sumber formal, yang menyediakan pelayanan hanya bagi orang-orang yang tidak bisa membayar pelayanan sosial yang diberikan.

Selain dengan sistem sumber, usaha yang dilakukan untuk menyalurkan Anak Jalanan terhadap kebijakan publik yang tidak memberikan kesempatan atau membatasi daya jangkau Anak Jalanan untuk memperoleh sumber-sumber dan pelayanan yang diperlukan. Kebijakan publik dimaksud, yaitu kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada kesejahteraan sosial anak jalanan, seperti kebijakan bidang pendidikan, pelatihan usaha, kesehatan, dan permodalan. Dalam konteks inilah usaha yang dilakukan pihak luar untuk menolong Anak Jalanan diperlukan suatu strategi yang disebut dengan advokasi sosial.

Advokasi sosisl dalam pemberdayaan tidak hanya sebagai pembelaan terhadap kasus dan berbicara di muka pengadilan, melainkan bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis, agar advokasi dapat dijalankan, maka advokasi harus diposisikan sebagai pekerja sosial dalam membantu masyarakat *marginal* dalam hal ini adalah anak jalanan. Peranan yang dilakukan di dalam profesi pekerja sosial dalam pembangunan masyarakat. Pekerja sosial melakukan advokasi pekerjaan sosial untuk membantu memberikan pertolongan atau pelayanan kepada orang yang

membutuhkan pertolongan, seperti orang yang terampas haknya atau terbaikan dalam sistem kebijakan sosial.

Menurut Mickelson dalam Suradi (2016) mendefinisikan : advokasi pekerjaan sosial sebagai *the act of directly representing, defending, intervening, supporting, or recommending a course of action on behalf of one or more individuals, groups, or communities with the goal of securing and retaining social justice.* Berdasarkan definisi tersebut, advokasi pekerjaan sosial merupakan tindakan yang secara langsung mewakili, mempertahankan, mencampuri, mendukung, atau merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan satu atau lebih individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan untuk menjamin atau menopang keadilan sosial.

Menurut Blakely dalam Wahyu Nurhayati, Dkk (2017: 20) mengatakan tentang advokasi pekerja sosial yaitu agar pekerja sosial dapat mengevaluasi pekerjaan mereka sebagai advokat, mereka harus memahami apa yang dimaksud dengan istilah/ *term*. Advokasi terkait dengan perubahan mendasar yang membela kepentingan kelompok-kelompok rentan. Meskipun profesi pekerjaan sosial telah lama dikaitkan dengan advokasi. Ada beberapa komponen-komponen dalam advokasi pekerjaan sosial menurut Adi Fahrudin dalam Naskah Akhir Advokasi (2016: 10) yaitu

a) Eksklusif (*exclusive*). Terma ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klien dan advokat yang menunjukkan hubungan tersebut hubungan tunggal, unik, terfokus kepada klien, tanggung jawab utama kepada klien, dan berpusatkan kepada kebutuhan manusia;.

b) Timbal Balik (*mutual*). Terma ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klien dan advokat sebagai hubungan timbal balik, saling ketergantungan, kesamaan, bersama, berbagi tahap hubungan satu sama lain, pertukaran gagasan dan merencanakan bersama-sama, dan memiliki kebersamaan satu sama lain;

c) Representasi (*representation*). Terma ini adalah berkaitan orientasi tindakan dan menjelaskan aktivitas advokat dengan berbicara, menulis, atau bertindak bagi pihak lain, berkomunikasi atau pernyataan kepedulian terhadap klien;

d) Klien (*client*). Dalam advokasi pekerjaan sosial, seorang klien (-klien) mendelegasikan kepada pekerja sosial untuk bertindak atas dirinya yaitu *representation*.

e) Masalah/penyebab (*cause*). Masalah biasanya isu tunggal, kondisi, atau masalah yang menyebabkan sejumlah orang berminat dan mendukung. Menurut Kotler (1972) dalam ada tiga jenis penyebab, yaitu:

(1) *Helping cause*, masalah pertolongan dimana advokat mencoba memberikan pertolongan, kenyamanan, atau pendidikan kepada korban kesalahan bantuan sosial termasuk rumah perlindungan (*shelter*) bagi wanita korban kekerasan atau perlindungan kepada lanjut usia;

(2) *Protest causes*, tindakan protes, dimana advokat mencoba mereformasi institusi yang menimbulkan masalah sosial, mempersoalkan tingkah laku baru untuk memperbaiki kondisi, contohnya rehabilitasi lingkungan pemukiman kumuh, atau menuntut agar pemerintah mengalokasikan dana untuk pelayanan kesehatan mental berbasis masyarakat;

(3) *Revolutionary causes*, dalam hal ini advokat berharap dapat mengurangi institusi atau pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi;

f) Forum (*forum*). Sebuah forum adalah majelis yang diorganisir untuk mendiskusikan isu, undang-undang, peraturan- peraturan, ketentuan-ketentuan, masalah publik, atau penyampaian opini;

g) Sistematika (*systematically*). Advokasi pada dasarnya bersifat sistematik. Hal ini karena advokasi menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam

suatu perencanaan. Keputusan tidak didasarkan kepada intuisi melainkan berdasarkan keterampilan menganalisis situasi bersama *klien*;

h) Pengaruh (*influence*). Pengaruh bermaksud modifikasi, perubahan, kesan, tindakan atau keputusan yang mempengaruhi *klien*. Beberapa aktivitas mempengaruhi termasuk mengorganisir kelompok *klien*, pembentukan koalisi, pendidikan *publik*, *persuasi* kepada administrator dan supervisor, berhubungan dengan pegawai pemerintah dan parlemen, pengumpulan data kajian, pemberian testimoni, pengembangan petisi, dan bahkan tindakan undang-undang.

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: 'advokasi kasus' (*case advocacy*) dan 'advokasi kelas' (*class advocacy*) menurut DuBois dan Miley, dalam Edi Suharto: 2005).

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).
2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah

organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam membantu masyarakat marjinal seringkali sangat berkaitan dengan konsep manajemen sumber (*resource management*) (DuBois dan Miley, dalam Edi Suharto, 2005). Demi mempermudah pemahaman mengenai strategi advokasi ke dalam tiga *setting* atau aras (mikro, mezzo dan makro) dan mengkajinya dari empat aspek (tipe advokasi, sasaran/klien, peran pekerja sosial dan teknik utama) seperti yang ditampilkan.

Tabel 3: Strategi Advokasi

ASPEK	STRATEGI		
	MIKRO	MEZZO	MAKRO
Tipe Advokasi	Advokasi Kasus	Advokasi Kelas	Advokasi Kelas
Sasaran/Klien	Individu dan keluarga	Kelompok formal dan organisasi	Masyarakat lokal dan nasional
Peran Pekerja Sosial	Broker	Mediator	ƒ Aktivis ƒ Analis Kebijakan
Teknik Utama	Manajemen kasus (case management)	Jejaring (networking)	ƒ Aksi sosial ƒ Analisis kebijakan

Sumber: Dikembangkan Suharto dari pendapat DuBois dan Miley (2005:228; 235-242)

Berdasarkan strategi advokasi yang telah dijelaskan di atas penelitain ini memfokuskan pada strategi advokasi mikro yang dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan masyarakat *marginal* dilakukan dengan membantu *klien* mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancangkembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber. Dengan demikian, manajemen sumber mencakup pengkoordinasian, pensistematisan dan pengintegrasian sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan klien individu, kelompok maupun masyarakat. Ketimbang memberi bantuan barang/uang secara langsung, pekerja sosial berkolaborasi dengan beragam *stakeholders* dan berupaya menghubungkan klien dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial

yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan memenuhi kebutuhan klien.

Strategi advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Apik Mandiri sebagai pekerja sosial dalam membantu anak jalanan di Kota Bandar Lampung mengacu pada pendapat Du Bois dan Miley dalam Teuku Zulyadi (2014) yaitu menggunakan strategi atau pendekatan Mikro. Pada aras atau pendektan mikro peran utama dari Lembaga Apik Mandiri sebagai pekerja sosial adalah sebagai broker (pialang) sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber bantuan yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial, teknik utama yang dilakukan pekerja sosial adalah manajemen kasus (*case management*) yang mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia. Ada beberapa kerangka kerja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Apik Mandiri sebagai pihak penghubung meliputi (dikembangkan oleh Suharto dari pendapat Du Bois dan Miley dalam Teuku Zulyadi, 2014: 69):

1. Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan (*Assessment*)

   Identifikasi masalah atau kebutuhan merupakan kegiatan yang diekspresikan dari sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Berdasarkan hal terebut Lembaga Apik Mandiri melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dimiliki oleh anak jalanan dengan cara melakukan penjangkauan secara langsung dan menyusun hasil *assessment* tersebut. Sehingga Lembaga Apik Mandiri dapat menemukan minat mereka dalam suatu bidang tertentu dan dapat menggali lebih dalam permasalahan yang anak jalanan hadapi supaya bisa ditemukan solusi yang tepat.

2. Memfasilitasi Pilihan-Pilihan, Memberikan Informasi dan Sumber *Alternativ*e;

   Lembaga Apik Mandiri memberikan beberapa opsi untuk anak jalanan agar dapat memilih sumber bantuan dalam bentuk latihan keterampilan atau pemberian kebutuhan baik dalam bidang rohani, kesehatan, pendidikan, dll.

3. Membangun Kontak Antar *Klien* dan Lembaga Pelayanan Sosial,

   Membangun kontak antar klien dan lembaga pelayanan sosial lainnya sangat penting dilakukan untuk membantu dalam menyelesaikan program kerja yang telah dibuat oleh suatu lembaga yang mempunyai tujuan tertentu. Semakin banyaknya suatu lembaga atau organisasi dalam membangun kontak dengan klien ataupun dengan lembaga tertentu maka akan semakin cepat dan efektif dalam menyelesaikan program-program yang telah disuse. Lembaga Apik Mandiri tidak mungkin bekerja sendiri melainkan harus membutuhkan dukungan dari klien ataupun lembaga sosial lainnya yang mempunyai kepentingan yang sama. Bantuan dan dukungan sangat membantu sekali menyelesaikan permasalahan anak jalaan agar lebih sejahtera.

4. Menjalin Relasi Kerjasama Dengan Berbagai Profesi Kunci;

   Menjalin relasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk seseorang atau sekumpulan orang yang membentuk suatu kelompok. Relasi yang baik akan menciptakan sebuah kerjasama yang akan menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang. Begitu pula menjalin kerjasama dengan berbagai profesi kunci, dimana profesi kunci sendiri adalah suatu pekerjaan yang menekuni bidang apapun yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Menjalin kerjasama dengan seeorang atau sekelompok orang yang mempunyai keahlian tertentu, sangat menguntungkan pada suatu lembaga yang ingin memerlukan keahlian

mereka. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Apik Mandiri membutuhkan berbagai profesi kunci untuk membantu membina dan memberdayakan anak jalanan sesuai program yang telah direncanakan. Sehingga dapat membantu anak jalanan mengubah hidup mereka menjadi lebih sejahtera dan tidak kembali ke jalanan lagi.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada tataran pengetahuan atau pemahaman baik kepada anak jalanan maupun pemerintah dalam hal ini, Dinas Sosial Provinsi Lampung atau kelembagaan yang lain tentang perlunya dukungan dalam program pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan lembaga Apik Mandiri. Advokasi memberikan program pemberdayaan anak jalanan maupun tentang manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Kemudian Lembaga Apik Mandiri melakukan kegiatan advokasi sosial dengan menjadi penghubung antara sumber bantuan yang ada dimasyarakat dalam hal ini para *stakeholder* baik dari pihak pemerintah Dinas Sosial Provinsi Lampung atau kelembagaan lain dengan anak jalanan sebagai penerima bantuan. Diharapkan kegiatan tersebut bisa membantu anak jalanan untuk keluar dari masalah sosial mereka, sehingga kedepannya mereka tidak kembali kejalanan. Adapun kerangka pikir dari penelitian kontol sebagai berikut:

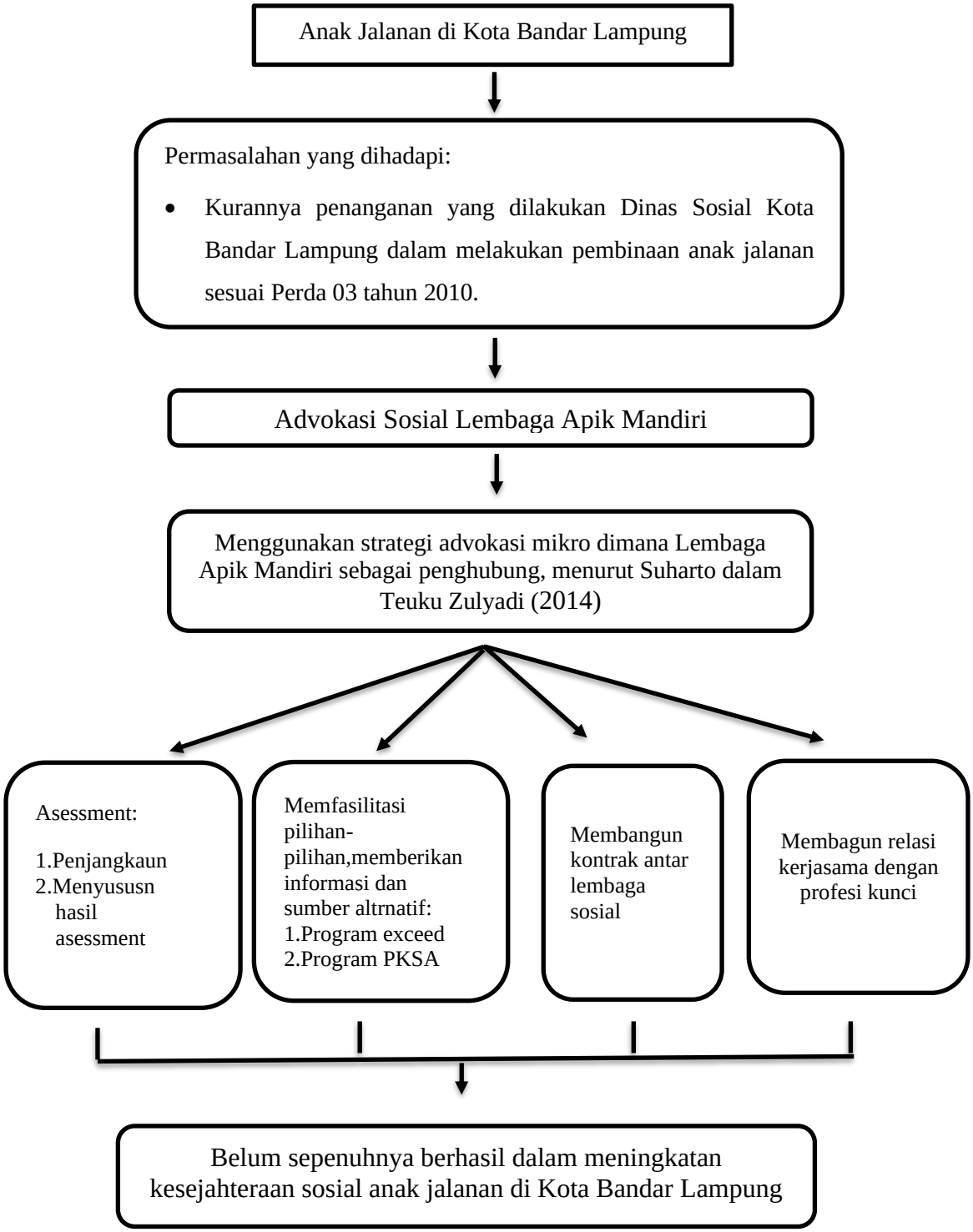

Bagan 1. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022.

2.4 Simpulan

Advokasi sosial sesungguhnya merupakan salah satu kegiatan dan atau strategi yang diperlukan di dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan realitas kemiskinan yang ada, dimana sebagian besar penduduk miskin digolongkan ke dalam kemiskinan struktural. Disebabkan oleh struktur sosial masyarakat, maka orang secara individu maupun kelompok tidak mampu mengakses sumber daya yang ada. Anak jalanan sebagai salah satu bagian dari kaum marginal yang memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya, disebabkan mereka termasuk ke dalam golongan kemiskinan yang struktural agar dapat mengubah keadaan sosial mereka lebih sejahtera. Keadaan yang sejahtera atau kesejahteraan sosial meliputi keadaan baik dan sehat atau sejahtera dan kepentingan sebagian besar manusia termasuk kebutuhan fisik, mental. perasaan, spiritual, dan ekonomi dapat terpenuhi.

Peran pemerintah maupun elemen masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan dalam membantu anak jalanan untuk mendapat kesejahteraan sosial mereka. Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan pada advokasi sosial yang dilakukan Lempaga Apik Mandiri sebagai pekerja sosial adalah sebagai broker (pialang) sosial yang menghubungkan *klien* (anak jalanan) dengan sumber-sumber bantuan yang tersedia di lingkungan sekitar, dengan kerangka kerja kegiatan meliputi: identifikasi Kebutuhan dan permasalahan (*assessment*), memfasilitasi pilihan-pilihan, memberikan Informasi dan Sumber *alternativ*e, Membangun kontak antar *klien* dan lembaga pelayanan sosial, Menjalin relasi kerja sama dengan berbagai profesi kunci.

Bab selanjutnya memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian, alasan pemilihan fokus dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan, informan teknik pengumpulan data, cara menganalisis data, serta teknik keabsahan data.

III. METODE PENELITIAN

Bab sebelumnya membahas mengenai teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Bab III ini membahas metode penelitian, dimulai dengan tipe penelitian, kemudian alasan pemilihan fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya, jenis dan sumber data yang digunakan, cara informan dipilih, teknik pengumpulan data, cara menganalisis data, serta teknik keabsahan data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Metode deskriptif yang digunakan peneliti bertujuan untuk lebih menekankan pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan bersifat uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang menjadi sub jek penelitian. Nawawi (1987: 63) mendefinisikan metode penelitian deskriptif di artikan sebagai berikut: “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya”.

3.2 FokusPenelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah fokus penelitian ini saling berkaitan.

Melihat permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung terkait maraknya anak jalanan dan kurangnya penanganan yang di lakukan oleh Pemerintah Bandar Lampung Penelitian ini memfokuskan pada apa advokasi sosial yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri dalam pelaksanaan pemberdayaan guna meningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tesebut Lembaga Apik Mandiri menggunakan strategi atau pendekatan Mikro yaitu peran utama dari Lembaga Apik Mandiri sebagai pekerja sosial adalah sebagai *broker* (pialang) sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber bantuan yang tersedia di lingkungan sekitar. Kerangka kerja yang akan dilakukan oleh Lembaga Apik Mandiri sebagai penghubung mengacu pada pendapat Suharto dalam Teuku Zulyadi (2014) yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan (Assessment)
2. Memfasilitasi Pilihan-Pilihan, Memberikan Informasi dan Sumber Alternative;
3. Membangun kontak antar lembaga pelayanan sosial,
4. Menjalin Relasi Kerja Sama dengan berbagai profesi kunci;

Alasan pemilihan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung sebagai fokus penelitian bahwasannya Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi

lampung yang menjadi salah satu kota yang diminati oleh para pekerja jalanan terutama anak jalanan dalam membantu perekonomian keluarga dan menurut data dari Dinsos Kota Bandar lampung dari tahun 2017-2019 belum terjadi penurunan yang *signifikat* terkait jumlah anak jalanan.

Alasan peneliti memilih Lembaga Apik Man diri sebagai unit fokus penelitian, karena merupakan salah satu lembaga Kesejahteraan Sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang menangani persoalan anak, baik anak jalanan, terlantar dll. Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang mereka terapkan. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk mengetahui advokasi sosial yang dilakukan oleh Apik Mandiri dalam mensejahterkan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Berhubungan dengan hal ini, jenis data dapat dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya.Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang telah diperoleh. Oleh karna itu, sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi partisipasi.Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan keterkaitan informan tersebut terhadap masalah penelitian. Data-data yang dibutuhkan sebagai data primer yang diperoleh dari wawancara adalah tindakan yang dilakukan Apik Mandiri dalam advokasi sosial anak jalanan.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan dilapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku dan *literature* lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data berupa dokumen dan pemberitaan terkait Lembaga Apik Mandiri, anak jalanan dan advokasi sosialnya. Serta dokumentasi kegiatan maupun program kerja dari pekerja sosial Lembaga Apik Mandiri dalam advokasi sosial anak jalanan.

3.4 Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber dengan penelitian ini, tentunya memiliki persyaratan-persyaratan dan sudah melalui pertimbangan dengan harapan nantinya dapat memahami betul bagaimana advokasi sosial yang di jalankan sehingga informasi yang di peroleh dari informasi penelitian tersebut mamapu memberikan keterangan_keterangan yang relevan dan akurat. Dalam pengambilan informan, peneliti menentukan memilih metode *purposive*. Penentuan informan melalui prosedur *purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2011:107). Sehingga untuk memilih subjek penelitian terdapat beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Informan Penelitaian

No	Nama	Status/Jabatan
1	Yeni Harnita S. Sos	Penaggungjawab Lembaga Apik Mandiri
2	Semi Indah Sari	Orang Tua Anak Jalana
3	Bayu	Anak Jalanan
4	Maulana	Anak Jalanan
5	Siti Marlena	Anak Jalanan
6	Suheri S.Sos. MM	Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial
7	Drs. Pairul Syah, M.H	Dosen Sosiologi sebagai pengamat sosial di Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, Yaitu sebuah teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian pada saat proses penelitian sedang berlangsung di lapangan (Sugiyono, 2007: 4). Observasi ini dilakukan dengan terus terang menyatakan kepada informan penelitian ini bahwa peneliti akan melakukan obserasi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat tentang kegiatan advokasi sosial dalam pemberdayaan anak jalanan yang telah di lakukan oleh Lembaga Apik Mandiri. Tujuan dari dilakukannya observasi ini adalah supaya peneliti mendapatkan informasi atau data yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Pada kegiatan observasi ini, Peneliti melihat langsung bentuk bantuan yang diterima olah pihak anak jalanan maupun orang tuanya serta hasil advokasi yang sudah Lembaga Apik Mandiri usahakan untuk anak jalanan agar dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih sejatera. Peneliti melakukan observasi bertujuan untuk melihat dan membandingkan secara langsung hasil yang ada dilapangan dengan hasil wawancara dengan responden

tentang advokasi sosial yang sudah dilakukan Lembaga Apik Mandiri tersebut. Di lapangan peneliti melihat kurangnya mengorek lebih dalam minat bakat anak jalanan terkait program pembinaan yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri dalam pelaksanaan advokasi sosial, pada saat wawancara dikatakan Lembaga Apik Mandiri memberikat beberapa pembinaan berupa pengembangan minat bakat terdiri dari pembuatan keterambilan souvenir, peternakan, kursus jahit, tata boga, perhotelan dll. Namun bulum sepenuhnya baru 2 program saja yang dilaksanakan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden tersebut di catat atau di rekam (Usman, 2009: 52). Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena pada saat wawancara berlangsung peneliti dapat menciptakan suasana yang nyaman dan agar tidak terkesan terlalu formal. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan (Sugiyono, 2014: 233-234)

Data hasil wawancara dalam penelitian ini merupakan data primer yang diolah dan dianalisis peneliti untuk kemudian dapat menjadi informasi. Dalam wawancara ini, Data-data yang dibutuhkan sebagai data primer yang diperoleh dari wawancarabstrak

a adalah tindakan yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri dalam mengadvokasi sosial anak jalanan.

Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Wawancara

No	Nama	Status/Jabatan	Pelaksanaan Wawancara
1	Yeni Harnita S. Sos	Penaggungjawab Lembaga Apik Mandiri	11 Oktober 2021
2	Semi Indah Sari	Anak Jalanan	24 Oktober 2021
3	Bayu	Anak Jalanan	20 Mei 2022
4	Maulana	Anak Jalanan	20 Mei 2022
5	Siti Marlena	Orang Tua Anak Jalanan	24 Oktober 2021
6	Suheri S.Sos. MM	Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial	26 Oktober 2021
7	Drs. Pairul Syah, M.H	Dosen sosiologi sebagai pengamat sosial di Bandar Lampung	9 November 2021

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Peneliti melakukan wawancara kepada responden mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021. Pada tanggal 11 Oktober 2021 peneliti melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Apik Mandiri sebagai pihak yang melakukan advokasi sosial, secara langsung bersama penanggungjawab Lembaga Apik Mandiri Ibu Yeni Harnita S. Sos. Setelah wawancara bersama penanggungjawab Lembaga Apik Mandiri, Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anak jalanan (Semi Indah Sari) dan orang tua anak jalanan (Siti Marlena) sebagai pihak yang meneima manfaat terhadap advokasi sosial yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri pada tanggal 24 Oktober 2021. Peneliti juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk responden. Kemudian pertanyaan dan hasil wawancara tersbut terlampir di lampiran.

Kemudian tanggal 26 Oktober 2021 peneliti melakukan wawancara bersama pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung secara langsung bersama Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, Bapak Suheri S.Sos. MM sebagai pihak yang diadvokasi terkait kurangnya penanganan mereka terhadap membantu mensejahterkan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Peneliti juga melakukan wawancara bersama pengamat sosial Kota Bandar

Lampung Bapak Drs. Pairul Syah, M.H selaku dosen Universitas Lampung untuk meminta pendapat beliu terkait permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Bandar Lampug, serta tanggapan beliau tetang advokasi sosial yang di lakukan Lembaga Apik Mandiri dalam membantu mensejahterakan anak jalanan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi yang penting dalam penelitian kualitatif, terutama jika sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2002: 56). Dokumentasi yang peneliti ingin peroleh dalam penelitian ini berupa dokumen yang terkait dengan lembaga Apik Mandiri, hasil advokasi sosial, dokumentasi kegiatan maupun program kerja dari pekerja sosial lembaga Apik mandiri dalam advokasi sosial anak jalanan.

Dokumentasi yang didapatkan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang berhubungan dengan advokasi sosial Lembaga Apik Mandiri dalam mensejahterakan anak jalnan di Kota Bandar Lamung adalah kegiatan-kegiatan advokasi sosial Lembaga Apik Mandiri, bentuk bantuan yang diterima anak jalanan, dan surat kerjsama baik antara Lembaga Apik Mandiri dengan sesama lembaga pelayanan sosial maupun dengan berbagai profesi kunci.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses menyusun dan mencari dengan cara sistematis data-data yang sudah di dapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil catatan lapangan, dengan menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih yang akan dipelajari dan memilih mana yang penting, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami

oleh peneliti dan orang lain (Sugiyono, 2007: 89). Model analisis data peneliti ini termasuk dalam bentuk Kualitatif dengan Model Interaktif yang di mana memiliki empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Slamet, 2002: 140) Untuk jelasnya dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Data yang muncul berupa kata-kata yang dikumpulkan dalam beragam bentuk yaitu observasi, wawancara serta data dokumentasi, kemudian data yang di peroleh melalui pencatatan di lapangan dianalisa melalui tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

2. Reduksi

   Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pengabstrakan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung secra terus-menerus selama prosyek berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data pada penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan memahami tentang advokasi sosial anak jalann, data dari hasil wawancara kemudian dipilah agar dapat disajikan dengan baik

3. Penyajian Data

   Penyajian data sebagai bentuk kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan terdapat adanya penarikan kesimulan danpengambilan tindakan. Melihat penyajian-penyajian penelitian akan mudah memahami yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau memahami suatutindakan atas dasar pemahaman yang di peroleh dari hasil penyajian-penyajian tersebut. Pada tahap penyajian data, yang di lakukan peneliti adalah menyajukan data berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut yang sudah di rangkum dan disederhanakan sehingga menghasilkan uraian yang jelas dan akurat.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Dari awal mengumpulkan data, peneliti mulai mencari arti dan benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverfikasi selama berlangsungnya penelitian.Ditemukannya tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang berkaitan saat sebelum, selama dan sesudah penggumpulan data, dengan ini membangun wawasan yang di sebut analisis.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam suatu penelitian yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) agar hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan.Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data.Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman sejawat (Sugiyono, 2014: 270).

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah teknik menguji kredibilitas data dan informasi dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Bungin, 2011:264-265), misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, ataupun dokumentasi.

3.8 Simpulan

Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tipe penelitian adalah kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Pemilihan fokus penelitian pada advokasi sosial Lembaga Apik Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung, karena maraknya anak jalanan dan kurangnya penanganan yang di lakukan oleh Pemerintah Bandar Lampung. Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data primer yang berasal wawancara dengan informan, serta data sekunder berasal dari dokumen terkait yang relevan dengan penelitian. Peneliti menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan. Penelitian ini mewawancarai Lembaga Apik Mandiri, Dinas Soial Kota Bandar Lampung, pengamat sosial Kota Bandar Lampung,dan anak jalanan serta orang tua anak jalanan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara di lapangan dan dokumentasi yang relevan. Teknik analisis data melawati proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data dalam penelitian adalah triangulasi teknik yang membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi ataupun observasi untuk memperoleh validitas data. Bab selanjutnya memaparkan Lembaga Apik Mandiri, yang merupakan pelaku advokasi sosial dalam fokus penelitian ini, meliputi struktur organisasi serta visi dan misi,program dan kegiatan Lembaga Apik Mandiri.

IV. GAMBARAN UMUM

Bab sebelumnya memaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan mengenai Lembaga Apik Mandiri. Bab ini dimulai dengan membahas sejarah singkat Lembaga Apik Mandiri di Kota Bandar Lampung, kemudian kepengurusan Lembaga Apik Mandiri. Bagian selanjutnya adalah visi dan misi kepengurusan Lembaga Apik Mandiri. Serta progam dan kegiatan Lembaga Apik Mandiri.

4.1 Lembaga Apik Mandiri

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial masyarakat serta independen, non-profit dan tersebar di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no. 184 tahun 2011 bahwasannya lembaga kesejahteraan sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.

4.1.1 Profil dan Sejarah

Singkat Berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Apik Mandiri Lembaga ini berdiri sejak tahun 2003 dengan nama Lemabaga Amanah Pendidik Insan Kamil oleh segenap kepengurusan dan dewan pendiri yaitu Dian Eka Darma Wahyuni, S.E. I Ketut Yasa Abadi, S.E. Siti

Habibah. S. Pd, Sri Atin, S. Pd I. Rohimi, S. Pd.I dan Aldila Aprilia dan Rima Firiani. Dengan latar belakang permasalahan anak jalanan, anak terlantar, anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal merupakan kondisi dan fenomena yang terus berkembang di kota besar, tidak terkecuali di Provinsi Lampung baik secara kuantitas maupun kualitasnya, dan tumbuh kembang anak yang lebih jauh akan mengganggu ataupun menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itulah penanganan permasalahan anak baik itu anak terlantar, anak jalanan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak-anak marginal lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah khususnya dinas sosial, lembaga terkait serta LSM ataupun Lemabaga yang ada di masyarakat. Keterpaduan jiwa sosial dan rasa kebangsaan yang mendalam membuahkan tekad yang kuat bagi para pendiri untuk mendirikan sebuah Lemabaga yang diberi nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri Lampung pada tahun 2006.

Konsep yang di terapkan oleh Lembaga Apik Mandiri dalam pemberdayaan dan pelayanan yang diberikan adalah “memastikan” anak-anak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan pemenuhan hak-hak anak serta pemberdayaan bagi keluarga. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada anak-anak yang beraktifitas ekonomi di jalan dan anak-anak yang mengalami keterlantaran. Lembaga Apik Mandiri didukung oleh 12 orang yang terdiri dari 2 orang peksos, 2 orang sarjana ekonomi, 2 orang sarjana pemerintahan, 2 orang IT, 4 orang sarjana pendidikan dan forum komunitas.

Lembaga Apik Mandiri merupakan suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak-anak yang memiliki masalah, baik anak terlantar, anak jalanan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnya dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Jadi lembaga ini merupakan penghubung antara

stakeholder yang akan membantu terkait masalahan anak-anak yang ada disekeliling kita, tidak terkecuali anak jalanan.

Lembaga Apik Mandiri mulai membentuk komunitas binaan yang merupakan pondasi utama suatu lembaga. Kegiatan di lakukan bersama folountir dan donatur yang tidak tetap hingga terbentuklah kominitas binaan sehingga mulai di percaya menjalankan program pemerintah sejak tahun 2009 hingga sekarang. Wilayah yang menjadi binaan Lembaga Apik meliputi wilayah: Kupang Teba (Kec. Teluk Betung Utara), Gulak Galik (Kec. Teluk Betung Barat), Pesawahan (Kec. Teluk Betung Selatan), Garuntang (Kec. Teluk Betung Utara), Sukaraja (Kec. Teluk Betung Selatan), Bakung (Kec.Teluk Betung Barat), Gunung Sulah (Kec. Sukarame), dan wilayah Kec. Tanjung Karang Pusat.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Apik Mandiri

Lembaga Apik Mandiri memiliki visi, misi dan tujuan, semua itu setidaknya diperuntukan bagi kepastian apa yang akan dilaksanakan, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Lemabaga ini benar-benar ingin menjaga dan menolong anak-anak bangsa yang terlantar, mencetak kader bangsa yang memiliki keperibadian yang lebih baik di mata semua bangsa.

a. Visi:

Menjadi organisasi sosial yang mandiri, pro fesional, dan terdepan dalam pelayanan dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial bagi 65 anak Indonesia guna membuka harapan dan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

b. Misi:

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pendidikan bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses sumberdaya melalui pengembangkan kegiatan ekonomi kreatif.
2. Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan kelestarian lingkungan.

c. Tujuan

1. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan,anak terlantar, anak-anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnya yang sesuai dengan nilai norma yang berlaku di masyarkat.
2. Mengupayakan anak-anak yang bermasalah untuk kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak yang bermasalah tersebut dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.
4. Menginformasikan keberadaan anak-anak tersebut dan keluarganya pada khususnya serta penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya, membantu kesulitan hidup agar dapat menata masa depan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup anak, keluarga, serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
5. Mendorong kepedulian masyarakat terhadap usaha pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, baik mental spiritual, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

4.1.3 Lokasi Lembaga Apik Mandiri

Selter Lembaga Apik Mandiri ini berada di jalan Raden Intan Gg. Pelita No. 10, berada di pusat jantung Kota Bandar Lampung. Sedangkan lokasi kantor pusat lembaga terletak di jalan Mayjend Sutiyoso no. 5 Kota Baru Bandar Lampung.

4.1.4 Struktur Organisasi Lembaga Apik Mandiri

Dalam instansi atau lembaga perlu adanya stuktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka semua anggota mengetahui kedudukan dan tanggungjawab masing-masing. Bekaitan dengan hal tersebut untuk memperlancar jalannya upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Lemabaga Apik Mandiri, maka dibentuk struktur yang tersusun sebagai terlampir berikut ini:

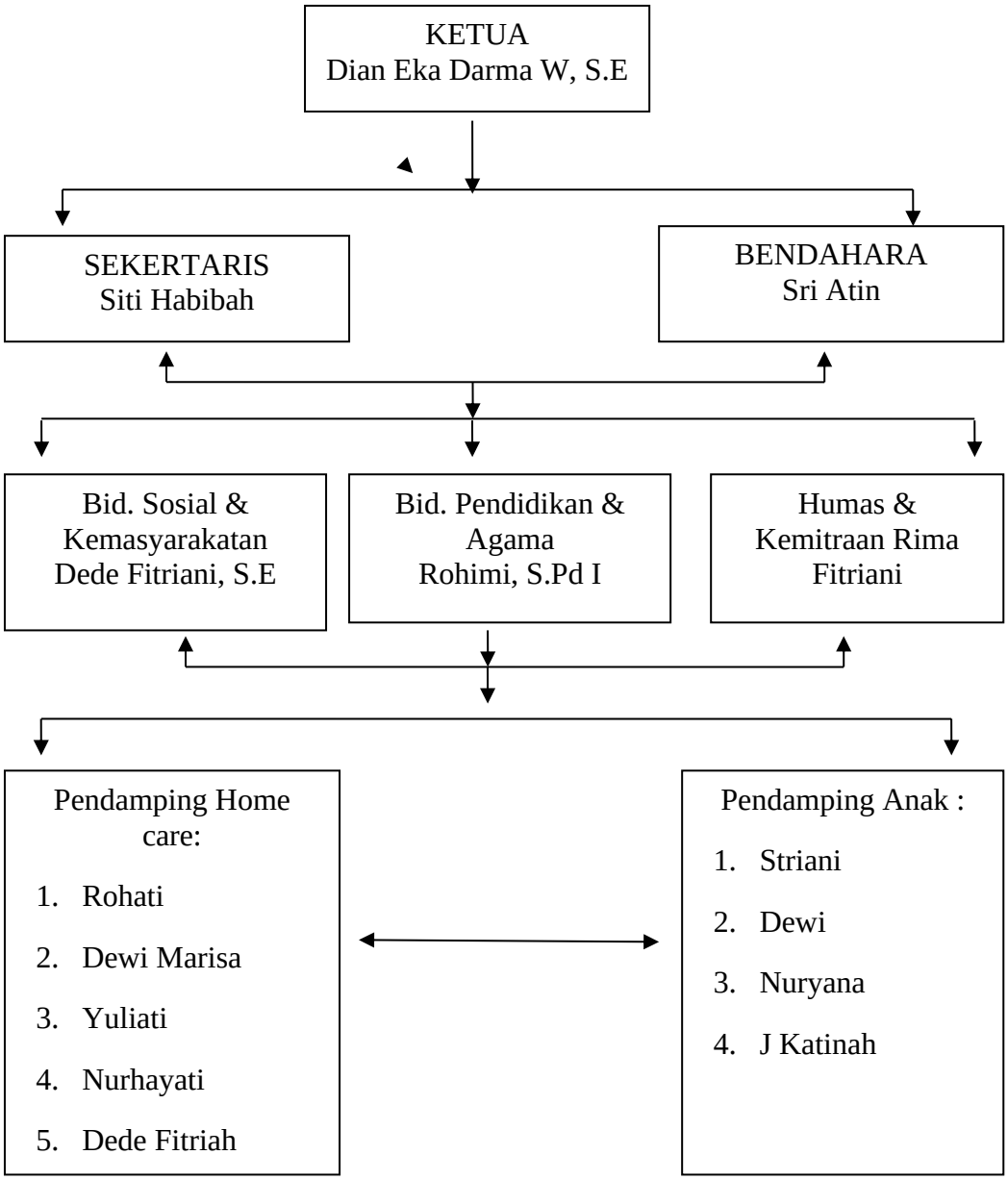

Bagan 2. Struktur Oraganisasi Lembaga Apik Mandiri
Sumber: Diolah Peneliti, 2021

4.1.5 Progam dan Kegiatan Lembaga Apik Mandiri

Ada tiga program dan kegiatan Lembaga Apik Mandiri dalam pemberdayaan anak jalanan, yatitu: program PKSA; pendampingan anak di keluarga, komunitas, dan sekolah; dan program EXCEED. Berikut rincian masing-masing program.

1) Program PKSA

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Ada beberapa kegiatan dalam melaksanakan progam PKSA yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri:

a) Kegiatan TEPAK

Kegiatan temu penguatan kapasitas anak dan keluarga (TEPAK) Kegiatn TEPAK ini terbagi menjadi dua, yang pertama adalah Temu Penguatan Kapasitas Keluarga/PKK berhubungan dengan peningkatan ketrampilan orang tua/pengasuh dalam pengasuhan anak (*parenting skill*), dan kelekatan/kedekatan orang tua/pengasuh dengan anak (*attachment*). PKK adalah kegiatan dukungan dalam bentuk pertemuan/penyuluhan/diskusi langsung dengan orang tua/ pengasuh anak, yang di siapkan secara terstruktur dan terencana, untuk meningkatkanpengetahuan, sikap dan ketrampilan keluarga dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak. PKA adalah upaya peningkatan ketrampilan anak dalam mengatasi masalah (*coping skills*) dan

daya tahan anak terhadap berbagai situasi dan masalah yang di hadapi anak (*resiliens*).

PKA adalah kegiatan dukungan untuk dan bersama anak penerima manfaat yang di siapakan secara terstruktur dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan hidup anak. Kegiatan TEPAK di laksanakan oleh LKS/LKSA dengan berkoordinasi dengan Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial), dengan sasaran pada anak dan keluarga. Meteri yang di sampaikan dalam kegiatan TEPAK berasal dari modul-modul yang sudah di persiapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI. Modul mencangkup materi untuk *cluster* anak balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

b) Asistensi Bersyarat/Tabungan anak qq orang tua.

Pemberian assistensi kepada anak berbentuk buk tabungan atas nama anak QQ orang tua yang bersyarat dengan jumlah tertentu. Pemberian assistensi ini bertujuan untuk mngikat anak dan orang tua agar tetap memenuhi hak-hak dasar anak terutama pendidikan. Tujuan lainnya memberikan pemahaman dan pengetahuan mengelola keuangan dengan memprioritaskan untuk hal-hal yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak.

2) Pendampingan anak di keluarga, komunitas, dan sekolah.

Pentingnya peran pendamping dalam mendidik dan mengawasi anak untuk senantiasa tidak terpengaruh hal-hal buruk. Pendamping sendiri ada pada keluarga, komunitas dan sekolah yang notabennya mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik untuk masa depan dan

juga perilaku anak. Ada beberpa kegiatan yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri sebagai pendamping:

a) Guru sahabat anak Memberikan motivasi dan pelatihan kepada guru-guru sekolah tempat anak jalanan bersekolah agar dapat menjadi sahabat bagi anak dan bukan "*Monster*" yang menakutkan bagi anak.

b) Remedial pemberian layanan pemantapan belajar kepada anak-anak jalanan yang masih sekolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penjangkauan dan pendampingan
2. Identifikasi kebutuhan
3. Menunjuk pengajar yang berkualifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan (memiliki pengalaman mengajar dan memahami hak-hak anak).
4. Memberikan *lifeskill* (komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan kesadaran diri).
5. Pelaksanaan remedial (pendidikan formal yang sesuai standar pelayanan minimal pendidikan nasional).
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan sekolah.
7. Monitoring dan Evaluasi perkembangan peserta didik.

c) *Bridging course* Kegiatan layanan perantaraan dan atau penghantaraan belajar kepada anak-anak yang telah putus (*droup out*) dari sekolah.

d) Monitoring setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh tim Apik Mandiri dalam proses penarikan anak jalanan ini memerlukan kesinambungan dan konsistensi yang terukur dengan baik. Sangat diperlukan pengawasan yang terpadu dan menyeluruh mulai dari internal tim Apik Mandiri sendiri sampai dengan guru pendamping, sekolah, anak, orang tua, masyarakat,

dan penerima manfaat itu sendiri agar maksud dan tujuan program dapat tercapai.

3) Program EXCEED

Program EXCEED merupakan program penghapusan eksploitasi tenaga kerja anak melalui pendidikan dan pengembangan ekonomi. Program ini dilakukan guna membantu anak jalanan yang tidak mempunyai bakat atau keahlian untuk dikembangkan dan diberikan arahan agar mampu mencari uang berdasarkan kahlian yang di ajarkan. Dalam pelaksanaan program exceed ada beberapa kriteria yang berhak menerima manfaat:

a) Anak jalanan yang berusia 9 tahun sampai dengan 18 tahun.

b) Beraktifitas ekonomi di jalanan.

c) Segala upaya penarikan agar dapat terpenuhi haknya baik dalam pendidikan dan *vocational training*.

4.2 Simpulan

Lembaga Apik Mandiri merupakan Lembaga Kesejahteraan sosial yang berdiri sejak tahun 2003 dan suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak-anak yang memiliki masalah, baik anak terlantar, anak jalanan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnya dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Jadi lembaga ini merupakan penghubung antara *stakeholder* yang akan membantu terkait masalahan anak-anak yang ada disekeliling kita, tidak terkecuali anak jalanan. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada anak-anak yang beraktifitas ekonomi di jalan dan anak-anak yang mengalami keterlantaran. Lembaga Apik Mandiri didukung oleh 12 orang yang terdiri dari 2 orang peksos, 2 orang sarjana ekonomi, 2 orang sarjana pemerintahan, 2 orang IT, 4 orang sarjana pendidikan dan forum komunitas.

Bab selanjutnya memaparkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai advokasi sosial Lembaga Apik Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung, dengan beberapa kerangka kerja kegiatan meliputi: identifikasi Kebutuhan dan permasalahan (*assessment*), memfasilitasi pilihan-pilihan, memberikan Informasi dan Sumber *alternativ*e, Membangun kontak antar *klien* dan lembaga pelayanan sosial, Menjalin relasi kerja sama dengan berbagai profesi kunci.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai advokasi sosial yang dilakukan oleh Lembaga Apik Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Dalam kegiatan *assessment* Lembaga Apik Mandiri belum sepenuhnya menggali lebih dalam akan minat program keterampilan yang sesuai dengan fasion anak jalanan tetapi dalam memenuhi kesejahteraan anak dari segi material dan spiritual berhasil Lembaga Apik Mandiri berhasil menggali lebih dalam sesuai kemauan anak jalanan.

Kegiatan memfasilitasi pilihan-pilihan, memberikan sumber informasi dan alternative, Lembaga Apik Mandiri belum sepenuhnya berhasil melaksanakan program yang telah ditetapkan ada dua program yaitu pemenuhan kebutuhan dasar anak jalanan dan pelatihan keterampilan. Pada program pelatihan ketermpilan gagal dilaksanakan hanya dua program yang jalan dari sepuluh program yang telah ditetapkan.

Kegiatan membangun kontak dengan lembaga sosial dan menjalin relasi kerjasama dengan profesi kunci peneliti menilai berhasil, namun masih minim sekali lembaga dan profesi kunci yang bergabung dalam usaha menejahterakan anak jalanan. Berdasarkan program kegiatan yang sudah terealisasikan Lembaga Apik Mandiri membuat anak jalanan sedikit demi sedikit tidak tergantung dengan jalanan lagi dengan memenuhi hak-hak mereka, memberikan bantuan berupa tabungan, kegiatan pelatihan kerajinan tangan

yang hasilnya dihargai Rp.5000,00, membantu anak jalanan dalam menambah kemampuannya untuk dapat mencari pekerjaan.

Advokasi sosial yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri merupakan salah satu bentuk refleksi dari teori strategi advokasi mikro, dimana Lembaga Apik Mandiri menjadi penghubung antara sumber daya yang didapat dengan anak jalanan yang akan diberdayakan. Adapun hasil penelitian ini, advokasi sosial yang dilakukan Lembaga Apik Mandiri belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan secara optimal karena masih ada beberapa program kegiatan yang tidak terealisasikan secara baik untuk kesejahteraan sosial anak jalanan. Tetapi dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Lembaga Apik Mandiri berhasil mengurangi waktu dan aktivitas anak jalanan di Bandar Lampung.

Pada keseluruhan penelitian ini memperlihatkan bahwa advokasi sosial merupakan sebuah kegiatan yang terstruktur yang tidak hanya berhubungan dengan lembaga hukum saja, melainkan ada suatu kegiatan yang dilakukan para pekerja sosial agar kaum marginal dalam hal ini anak jalanan dapat mendapat sumber-sumber bantuan yang ada di masyarakat. Sumber-sumber bantuan tersebut lalu dikelola oleh suatu lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga sosial untuk bisa di distribusikan kepada kaum marginal. Sehingga sumber-sumber bantuan tersebut dapat meringankan beban, mengurangi permasalahan kaum *marginal* ataupun merubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Apik Mandiri dalam advokasi sosial masih ada beberapa yang belum terealisasikan dengan baik dalam kesejahteraan anak jalanan, diharapkan lebih professional menggali kebutuhan anak baik untuk kebutuhan material, sepiritual, maupun menentukan minat bakat anak jalanan. Serta keberlanjutan dalam program pemberdayaan harus dilakukan

supaya kegiatan tersebut tidak terhenti dan mempunyai dampak terhadap kesejahteraan sosial anak jalanan dan orang tuanya. Dalam membangun kerjasama baik antar lembaga pelayanan sosial dan membangun relasi kerja sama dengan profesi kunci lebih ditingkatkan untuk mencari lebih banyak lagi kerjasama, sehingga tidak terulang lagi ada program yang tidak berjalan karena kurangnya sumber daya maupun ahli dibidangnya.

2. Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat mendukung baik dari segi kebijakan pembinaan, pendanaan, pendidikan, dan kesehatan anak jalanan, maupun dari segi teknis kepada para *stakeholder* dalam kegiatan membantu anak jalanan meraih kesejahteraannya. Adapun untuk Dinas Sosial Kota Bandar Lampung diharapkan lebih banyak melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakat maupun *stakeholder* dan menjadi pendamping bagi mereka dalam menangani permasalahan sosial khususnya anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

3. Hendaknya untuk anak jalanan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan semangat dan penuh percaya diri bahwa mereka bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera atau bisa mendapatkan hidup yang layak. Namun dari pada itu peneliti berharap juga kepada lebih banyak pihak untuk lebih mengajak orang tua dan keluarga dari anak jalanan di daerah Kota Bandar Lampung tersebut agar dapat ikut membantu membina dan memberikan usaha khusus bagi anak-anak mereka agar tidak kembali kejalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Prenada Media Group.

Dedeh Maryani, R. R. (2019). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.* Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.

DIANI, R. M. (2018). *Strategi Advokasi Bagi Anak Jalanan Melalui Yayasan Rumah Impian.* Yogyakarta: repository.ugm.ac.id.

Khaizhu, I. (2009). Upaya-Upaya Perlindugan Oleh Organisasi sosial Keagamaan Lokal Bagi Anak Yang Berada di Pemukiman Rawan. *FISIP UI*, 25, 28.

KPAI, W. (2020, Desember 03). *Hasil pengawasan pekerja anak ta 2020 di 9 prov 20 kota-kabupaten*. Retrieved Januari 2, 2021, from www.kpai.go.id: www.kpai.go.id/berita/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab

MA Amin, H. K. (2014). PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL . *Social Work Journal, jurnal.unpad.ac.id*, 186.

Miller, V. a. (2005). *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Bertindak, dan Revleksi/ Valerie Miller dan Jane Covey; Penerjemah: Hermoyo – Ed 1.* Jakartaia: :Yayasan Obor Indones.

Nawawi, H. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Puspitasari, P. C. (2019). *ADVOKASI SOSIAL ANAK JALANAN DI KOTA MALANG (Studi Pada Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan di Kota Malang, Jawa Timur).* Malang, Jawa Timur: eprints.umm.ac.id.

Putra, F. D. (2015). “Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah” . Bandung: Universitas Padjadjaran. *Share Social Work Jurnal*, Vol. 5 No. 1.

R, S. R. (2004). *Pengantar Advokasi Panduan Latihan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rukminto, A. (2008). *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Rajaali Pres.

Sugiyono. (2007). . *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung:: Alfabeta.

Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri.* Cetakan Kedua.

Suharto, E. (2009). *Membangu Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: PT Revika Adtama.

Sumaryad. (2005). *Perencanaan Pembangunan daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta:: CV CitraUtama.

Suradi. (2011). ADVOKASI SOSIAAL DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. *E Jurnal Kemensos*, Vol. 16 no.02.

Suyanto, B. (2013.). *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

Usman, H. (2009). *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahyu Nurhayati, D. (2017, Desember 2017). ADVOKASI PROGRAAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG. *PEKSOS Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, Vol. 16 No. 2.

Wenger, E. e. (2002). . *Cultivating Communities of Practice.s.* Harvard Business School Pres.

Zulyadi, T. (2014). . “Advokasi Sosial”. . Juli – Desember 2014. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 21, No. 30.